

ANALISIS PILAR INFRASTRUKTUR YANG MEMPENGARUHI DAYA SAING DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Lilyk Eka Suranny

Peneliti Ahli Muda Bappeda dan Litbang Kabupaten Wonogiri
lilykekasuranny@gmail.com

Abstract. *Infrastructure is one of the pillars that influence regional competitiveness. The purpose of this study is to analyze the infrastructure pillars that influence the Regional Competitiveness Index (IDSD) of Wonogiri Regency and provide recommendations to increase the competitiveness of Wonogiri Regency. The data collected is secondary data from the Central Agency on Statistics (BPS) and other official institutions. Data analysis used quantitative and qualitative descriptive analysis. The results showed that the IDSD value of Wonogiri Regency in the infrastructure pillar was still below the average of the Regency / city competitiveness index in Central Java. Efforts that can be made by the government in overcoming infrastructure problems are by collaborating on APBD budget funds and village / kelurahan funds for infrastructure development/maintenance both for transportation infrastructure, clean water and electricity infrastructure.*

Keywords: *regional competitiveness index (IDSD), infrastructure pillar, Wonogiri Regency*

Abstraksi. *Infrastruktur merupakan salah satu pilar yang berpengaruh pada daya saing daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pilar infrastruktur yang mempengaruhi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Wonogiri serta memberikan rekomendasi guna peningkatan daya saing daerah Kabupaten Wonogiri. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik dan institusi resmi lainnya. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai IDSD Kabupaten Wonogiri pada pilar infrastruktur masih dibawah rata-rata nilai indeks daya saing Kabupaten/kota di Jawa Tengah. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan infrastruktur yaitu dengan melakukan kolaborasi anggaran dana APBD dan dana desa/kelurahan untuk pembangunan/perawatan infrastruktur baik untuk infrastruktur transportasi, infrastruktur air bersih dan kelistrikan.*

Kata kunci: *indeks daya saing daerah, pilar infrastruktur, Kabupaten Wonogiri*

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian dari integral pembangunan nasional dan sejalan dengan prinsip-prinsip kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah maka konsekuensinya adalah adanya

penyerahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Adanya desentralisasi kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tersebut telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan daerah dalam rangka

memaksimalkan pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut maka penyelenggaraan pemerintahan pada era desentralisasi (otonomi daerah) harus mampu meningkatkan kemandirian daerah dan daya saing daerah yang berimplikasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat kearah yang lebih baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang dimilikinya, serta mampu melakukan percepatan dalam rangka mendorong peningkatan pelaksanaan diseluruh aspek.

Daya saing (*competitiveness*) suatu daerah merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Secara konsep, daya saing menunjukkan kemampuan suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain dalam menetapkan strategi yang tepat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Daerah harus mampu mencari dan mengenal potensi yang akan dikembangkan dan dapat berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat setempat. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, diharapkan akan semakin mempercepat kemampuan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Mengingat betapa pentingnya daya saing, maka daya saing tersebut menjadi tiga prioritas penting dari sembilan visi, misi, dan program aksi Presiden Joko Widodo yang dikenal dengan sebutan Nawacita. Tiga prioritas yang terkait dengan daya saing adalah (1) meningkatkan kualitas hidup manusia;

(2) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan (3) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Selain dari itu, arah Pembangunan Nasional Jangka Panjang sebagaimana termuat dalam RPJMN Tahun 2015 – 2019 adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek (Kemenristekdikti, 2018).

Sejalan dengan hal tersebut, maka pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mengadakan kegiatan Indeks Inovasi Daerah dan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi mengadakan Kegiatan Indeks Daya Saing Daerah. Penghargaan Inovasi dan Daya Saing Daerah ini diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia sebagai apresiasi atas prestasi dalam penguatan inovasi daerah sehingga menghasilkan nilai tambah, baik dalam bentuk komersial, ekonomi maupun sosial budaya sehingga berdampak kepada peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya guna tercapainya kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daerah dengan skor IDSD tertinggi diartikan sebagai daerah yang berhasil secara optimal memanfaatkan segala potensi yang dimilikinya sebagai upaya menciptakan daya saing dan

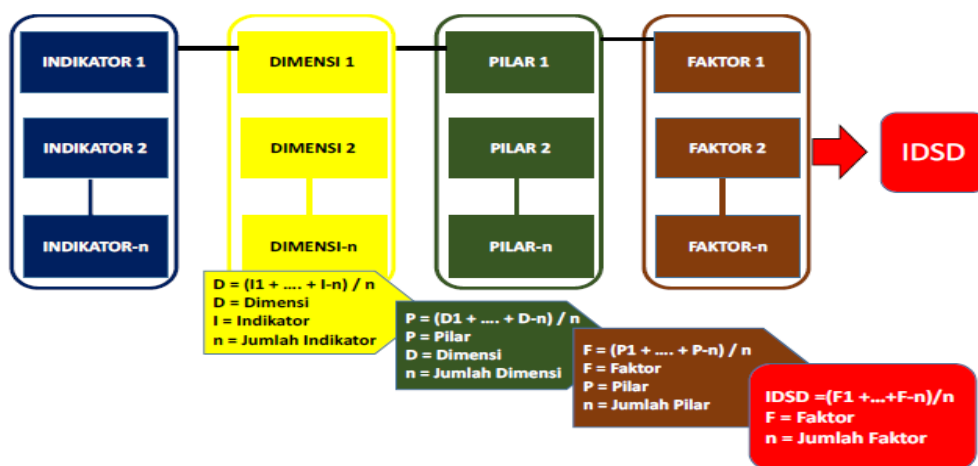
kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Dalam Penghargaan Daya Saing Daerah oleh Kemenristekdikti ada 12 Pilar/Variabel (Pilar Kelembagaan, Pilar Infrastruktur, Pilar Perekonomian Daerah, Pilar Kesehatan, Pilar Pendidikan dan Keterampilan, Pilar Efisiensi Pasar Produk, Pilar Ketenagakerjaan, Pilar Akses Keuangan, Pilar Ukuran Pasar, Pilar Kesiapan Teknologi, Pilar Dinamika Pasar, Pilar Kapasitas Inovasi) yang menjadi komponen daya saing daerah (Kemenristekdikti, 2018).

Kelengkapan sarana dan prasana wilayah (infrastruktur) akan mendorong peningkatan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, kondisi infrastruktur yang baik merupakan prasyarat utama bagi upaya meningkatkan daya saing daerah maupun perkembangan perekonomian. Berdasarkan pada hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pilar infrastruktur yang mempengaruhi Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya akan direkomendasikan masukan bagi peningkatan dan rencana tindak guna peningkatan daya saing daerah Kabupaten Wonogiri khususnya pada pilar infrastruktur.

METODE PENELITIAN

Ada beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan perhitungan nilai indeks daya saing daerah (IDSD). Diawali dengan mengisi 90 pertanyaan/indikator/kuisisioner yang dilengkapi dengan data dukung secara online melalui web <http://indeks.inovasi.ristekdikti.go.id>.

Selanjutnya verifikasi data dukung yang dilampirkan dalam pengisian kuesioner dan sistem secara otomatis akan melakukan perhitungan nilai indeks daya saing setiap daerah. Hasilnya akan didapatkan skor indeks untuk setiap komponen IDSD baik nilai setiap dimensi, nilai setiap pilar, dan nilai per aspek/faktor maupun skor IDSD total. Tahapan perhitungan nilai IDSD terlampir pada gambar 1. Hasil perhitungan nilai IDSD Kabupaten Wonogiri tersebut selanjutnya dianalisis. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis pada pilar infrastruktur. Pilar infrastruktur terdiri dari dimensi/indikator infrastruktur transportasi dan dimensi infrastruktur air bersih dan kelistrikan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS Kabupaten Wonogiri, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, EDSM Provinsi Jawa Tengah dan data dukung lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dilakukan dengan mempelajari dokumen terkait data yang dibutuhkan dalam penelitian. Hasil dari perhitungan indikator pada pilar/variabel infrastruktur tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil rata-rata variabel infrastruktur pada seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Selanjutnya dilakukan analisis atas hasil tersebut menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Dari hasil analisis tersebut akan direkomendasikan kebijakan untuk meningkatkan daya saing daerah Kabupaten Wonogiri khususnya pada pilar infrastruktur.



Sumber: Pedoman Teknis Penilaian IDSD Bappeda Provinsi Jawa Tengah 2018

Gambar 1. Tahapan dan Rumus Perhitungan Nilai Indeks Daya Saing Daerah

HASIL DAN PEMBAHASAN

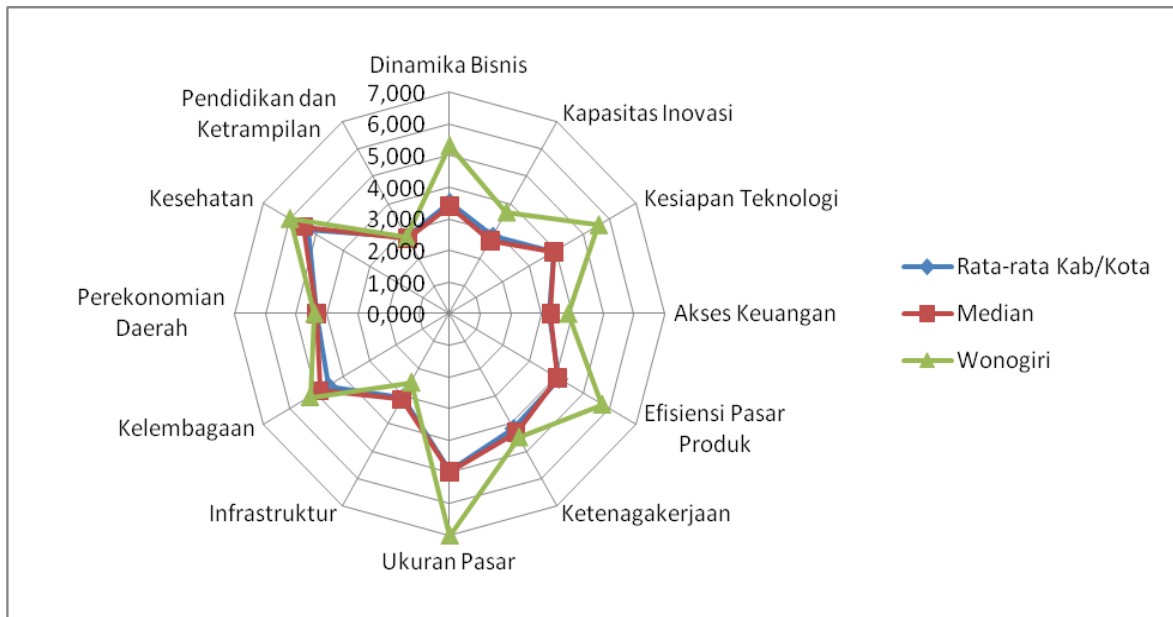
Pemerintah pusat melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia mengadakan kegiatan Anugerah Iptek Budhipraja. Berdasarkan hasil penilaian diperoleh nilai indeks daya saing daerah Kabupaten Wonogiri adalah 4,646. Dari penilaian setiap pilar pembentuk IDSD, diperoleh nilai pilar infrastruktur adalah 2.5. Nilai ini paling rendah diantara pilar lainnya apabila dibandingkan dengan nilai rata-rata setiap pilar pembentuk IDSD Kab/kota Se-Jawa Tengah. Dalam

penelitian ini sebagai pembanding adalah nilai IDSD kab/kota se-Jawa Tengah pada setiap komponen pilar pembentuknya. Pada pilar infrastruktur dan pilar pendidikan&ketrampilan nilai IDSD Kabupaten Wonogiri masih dibawah rata-rata Kab/Kota di Jawa Tengah. Namun untuk pilar infrastruktur nilainya paling rendah diantara pilar pembentuk Indeks Daya Saing Daerah di Kabupaten Wonogiri. Nilai hasil IDSD Kabupaten Wonogiri dibandingkan dengan nilai rata-rata Kab/Kota di Jawa Tengah tersaji dalam Tabel 1.

Tabel 1.
 Nilai hasil IDSD Kabupaten Wonogiri, nilai median dan nilai rata-rata Kab/Kota di Jawa Tengah

	Pilar	Dinamika Bisnis	Kapasitas Inovasi	Kesempatan Teknologi	Akses Keuangan	Efisiensi Pasar Produk	Ketega kerja an	Ukuran Pasar	Infrastruktur	Kelembagaan	Perekonomian Daerah	Kesehatan	Pendidikan dan Ketrampilan
1	Rata-rata Kab/Kota	3,515	2,824	3,914	3,251	4,110	4,171	4,948	3,061	4,561	4,339	5,329	2,800
2	Median	3,4	2,667	3,9	3,286	4,056	4,333	5	3,125	4,875	4,333	5,5	2,743
3	Wonogiri	5,3	3,7	5,6	3,857	5,722	4,5	7	2,5	5,25	4,4	6	2,792

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018



Gambar. 2
Nilai IDSD rata-rata Kab/Kota di Jawa Tengah, nilai median IDSD dan nilai IDSD Kabupaten Wonogiri berdasarkan 12 pilar pembentuk IDSD

Berdasarkan gambar 2, nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Wonogiri paling rendah pada pilar infrastruktur. Dalam penilaian indeks daya saing daerah, komponen pembentuk pilar infrastruktur terdiri dari infrastruktur transportasi, infrastruktur air bersih dan kelistrikan. Luas wilayah Kabupaten Wonogiri memiliki luasan nomor 3 se-Jateng setelah Kab. Cilacap dan Kab. Grobogan (BPS Jateng, 2018). Kabupaten Wonogiri memiliki 26 kecamatan yang terdiri dari 251 desa dan 43 kelurahan. Atribut tentang Infrastruktur transportasi yakni tentang kondisi jalan dan sarana angkutan yang ada di Wonogiri. Panjang jalan permukaan yang baik di Kabupaten Wonogiri sebesar 537,7 km, panjang jalan permukaan yang sedang sebesar 289,06 km, panjang jalan permukaan yang rusak sebesar 200,81 km dan jalan rusak berat 10,9 km. Pembangunan infrastruktur memiliki peran yang penting

dalam perekonomian masyarakat. Melalui akses infrastruktur seperti jalan misalnya, dengan kondisi jalan yang baik maka akan mempermudah aktivitas masyarakat dalam melakukan kegiatan di berbagai bidang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wasilan (2015), bahwa infrastruktur yang memadai sebagai penunjang aktivitas ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur jalan dalam kondisi baik akan mempermudah mobilisasi penyaluran barang dan jasa serta mengurangi akses masyarakat yang terisolir.

Perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Wonogiri menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur jalan dan jembatan dari tahun 2016-2018 sebesar Rp 503.711.249.096 atau 26,1% terhadap total belanja langsung. Kedepannya akan terus dilakukan perbaikan dan

pembangunan infrastruktur sesuai dengan fokus prioritas pembangunan di Kabupaten Wonogiri yang salah satunya yaitu pembangunan infrastruktur untuk

mengurangi kesenjangan antar wilayah. Data panjang jalan menurut kecamatan dan kondisi jalan ditunjukkan pada tabel 2

Tabel 2.
Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2016

No	Kecamatan	Kondisi Jalan			
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak berat
1	Pracimantoro	36,93	19,07	-	-
2	Paranggupito	23,38	5,48	3,50	-
3	Giritontro	16,07	-	3,48	-
4	Giriwoyo	6,35	3,85	20,85	-
5	Batuwarno	18,88	6,88	8,84	-
6	Karantengah	17,58	6,90	9,82	2,30
7	Tirtomoyo	34,91	10,69	21,54	8,60
8	Nguntoronadi	13,36	16,68	4,03	-
9	Baturetno	19,39	11,00	1,31	-
10	Eromoko	21,83	7,29	45,21	-
11	Wuryantoro	9,92	7,30	4,55	-
12	Manyaran	14,50	1,00	5,79	-
13	Selogiri	20,74	10,12	13,01	-
14	Wonogiri	52,60	63,43	10,42	-
15	Ngadirojo	36,13	16,32	1,93	-
16	Sidoharjo	19,75	8,68	8,60	-
17	Jatiroto	19,25	3,90	9,67	-
18	Kismantoro	21,43	6,07	7,37	-
19	Purwantoro	19,50	13,27	3,43	-
20	Bulukerto	17,13	-	-	-
21	Puhpelem	6,32	5,30	-	-
22	Slogohimo	27,60	26,29	8,26	-
23	Jatisrono	30,55	23,08	1,44	-
24	Jatipurno	12,92	1,27	-	-
25	Girimarto	20,70	15,21	7,78	-
26	Wonogiri	537,70	289,06	200,81	10,90

Sumber : Kabupaten Wonogiri Dalam Angka 2017

Selain hal tersebut diatas rendahnya nilai pilar infrastruktur ini juga diakibatkan dari kontribusi nilai PDRB dari sektor transportasi dan perdagangan, sektor pengadaan listrik dan air bersih yang rendah. Persentase kontribusi nilai PDRB perolehan dari sektor transportasi

dan perdagangan terhadap PDRB total Kabupaten Wonogiri tahun 2016 adalah 5,88% (Wonogiri Dalam Angka, 2017). Sedangkan persentase kontribusi nilai PDRB perolehan dari sektor pengadaan listrik terhadap PDRB total Kabupaten Wonogiri tahun 2016 adalah 0,07%

(Wonogiri Dalam Angka, 2017). Rendahnya kontribusi sektor transportasi terhadap PDRB di Kabupaten Wonogiri disebabkan kurangnya pemanfaatan transportasi umum oleh masyarakat. Masyarakat Wonogiri saat ini lebih banyak memanfaatkan transportasi pribadi dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Hal tersebut berimbas pada beberapa pengusaha angkutan umum

yang mengalami gulung tikar. Dari sektor pengadaan listrik dan air kebanyakan dimanfaatkan oleh rumah tangga masyarakat dan perusahaan/pabrik di Kabupaten Wonogiri. Jumlah pabrik/perusahaan tidak banyak, sehingga pada sektor ini berkontribusi rendah. Persentase distribusi PDRB berdasarkan lapangan usaha Kabupaten Wonogiri tahun 2013-2016 tersaji dalam tabel 3.

Tabel 3.

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Wonogiri (persen), 2013-2016

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	35,83	34,23	33,65	32,86
2	Pertambangan dan Penggalian	3,13	3,24	3,40	3,32
3	Industri Pengolahan	14,39	15,22	15,49	16,00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,07
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,07	0,07	0,07	0,06
6	Konstruksi	6,24	6,40	6,52	6,54
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	16,15	15,80	15,62	15,59
8	Transportasi dan pergudangan	5,49	5,84	5,98	5,88
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	2,27	2,27	2,29	2,38
10	Informasi dan komunikasi	0,74	0,75	0,73	0,74
11	Jasa keuangan dan asuransi	2,95	2,97	3,02	3,20
12	Real estate	0,71	0,73	0,74	0,75
13	Jasa perusahaan	0,36	0,37	0,38	0,41
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	3,07	3,04	3,06	3,05
15	Jasa pendidikan	5,97	6,31	6,28	6,43
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,89	0,93	0,96	0,98
17	Jasa lainnya	1,68	1,77	1,73	1,76
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Wonogiri Dalam Angka, 2017

Penyediaan saran dan prasarana seperti angkutan penumpang dapat memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat karena akan menghubungkan antar wilayah. Sarana Angkutan

Penumpang di Kabupaten Wonogiri ditunjukkan pada tabel 4. Sarana angkutan penumpang di Kabupaten Wonogiri tiap tahun mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar

11.897 menjadi 6.475 tahun 2017. Hal ini menunjukkan berkurangnya sarana angkutan penumpang padahal sarana angkutan merupakan hal yang penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah pelosok untuk menuju ke wilayah pusat pemerintahan maupun industri serta sarana angkutan penumpang

sangat penting dalam mobilitas yang tinggi akan meningkatkan perekonomian di Kabupaten Wonogiri. Bagi masyarakat menengah kebawah yang tidak memiliki angkutan pribadi maka keberadaan angkutan umum sangat membantu baik sebagai angkutan penumpang ataupun angkutan barang

Tabel 4.
Sarana Angkutan Penumpang di Kabupaten Wonogiri Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Bus AKAP	563	520	539	525	525
Bus AKDP	189	235	251	234	234
Minibus Angkutan Pedesaan	607	607	362	362	362
Angkuta	85	85	85	85	85
Truk 2 As/Sumbu	4.188	4.188	4.761	4.761	2.112
Truk 3 As/Sumbu	125	125	131	131	42
Picup Box	6.140	6.140	7.570	7.570	3.115
Jumlah	11.897	11.900	13.699	13.668	6.475

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri tahun 2017

Tersedianya Infrastruktur air bersih yang digunakan masyarakat merupakan salah satu indikator atribut kuesioner yang digunakan dalam penilaian IDSD. Penyediaan air bersih pada masyarakat akan berpengaruh pada tingkat perekonomian di Kabupaten Wonogiri. Secara umum pemenuhan kebutuhan air bersih yang layak digunakan masyarakat yakni dengan sistem perpipaan dan non perpipaan. Persentase rasio jumlah pelanggan air bersih dibanding jumlah penduduk yang memanfaatkan jaringan air bersih berbasis PDAM dan Pamsimas (Perpipaan) ataupun dari sumur gali dan sumber air bersih lainnya (non perpipaan) di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2016 yakni mencapai 80,31%. Sedangkan 19,69% belum mendapatkan air bersih. Ada beberapa daerah yang belum

terlayani air bersih seperti Kecamatan Paranggupito yang wilayahnya berupa pegunungan kars sehingga rawan kekeringan. Dari 80,31% yang telah terlayani, 54,31% dipenuhi melalui sambungan air bersih non perpipaan dan 25,99% dari jaringan perpipaan (Bappeda dan Litbang Kab. Wonogiri, 2017). Beberapa indikasi yang menyebabkan belum tercapainya target untuk penyediaan sambungan air bersih disebabkan antara lain; (1) kondisi sarana air bersih yang belum layak, walaupun sarananya telah tersedia sehingga perlu untuk meningkatkan kualitasnya; dan (2) program penyediaan air bersih yang terkendala oleh kondisi fisik wilayah yang menyulitkan dalam implementasinya. Data pemenuhan sarana air bersih di Kabupaten Wonogiri tahun 2016 tersaji pada tabel 5

Tabel 5.
Pemenuhan sarana air bersih di Kabupaten Wonogiri tahun 2016

Sistem Jaringan	Jumlah Terlayani		Prosentase
	Sambungan rumah	Jiwa	
Jaringan Perpipaan			
SAB Oleh pemerintah	24.139	96.556	10,17
SAB Swadaya masyarakat	4062	16248	1,71
PDAM	33460	133840	14,1
Jml. Terlayani Perpipaan		246.644	25,98
Jaringan Bukan Perpipaan			
Sumur gali	105.502	422.008	44,46
Sungai/Waduk		1235	0,13
mata air		80.871	8,52
tadah hujan		11.363	1,19
Jml. Terlayani Bukan Perpipaan		515.477	54,31
Jumlah terlayani SAB air bersih		762.121	80,31
Jumlah belum terlayani		186.898	19,69
Jumlah penduduk		949.017	100

Sumber: Bappeda dan Litbang Kab. Wonogiri, 2017

Listrik berperan penting dalam kehidupan, dimana listrik menjadi sumber energi utama baik untuk kebutuhan rumah tangga ataupun industri. Penyediaan listrik tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Jumlah pengguna atau pelanggan listrik di Kabupaten Wonogiri dari rumah tangga sebesar 89,29%. Jumlah tersebut tergolong rendah jika dibandingkan dengan pelanggan listrik di Kab/Kota di Jawa Tengah. Bahkan kabupaten Wonogiri menempati peringkat ke 31 berdasarkan data laporan realisasi elektrifikasi distribusi Jawa Tengah bulan Maret 2018 (tabel 6). Ada 9.119 rumah yang belum teraliri listrik yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten.

Ketidakterediaan energi listrik merupakan salah satu indikator daerah tertinggal atau kemiskinan (Kristianto, 2015). Berdasarkan penelitian Anas dan Lee (1996), bahwa kekurangan kapasitas listrik menjadi hambatan besar pada perkembangan perusahaan di Nigeria. Infrastruktur listrik merupakan energi penting dalam pengembangan kehidupan manusia, listrik digunakan untuk berbagai kegiatan baik di kota maupun di pedesaan. Kebutuhan listrik dari waktu ke waktu semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan sosial masyarakat. Olehkarena itu ketersedianya jaringan listrik yang memadai bagi masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 6.
Laporan Realisasi Rasio Elektrifikasi Distribusi Jawa Tengah Bulan Maret 2018

NO	KABUPATEN	JML. PLG RMH TANGGA	JML. PLG RMH TANGGA NON PLN	JML. PLG RMH TANGGA TOTAL	RE PLN (%)	RE TOTAL (%)
	JAWA TENGAH	8.988.159	8.088	8.996.247	96,91	97
1	Cilacap	478.715	320	477.035	99,71	99,37
2	Kebumen	329.688	367	330.055	100,00	100,00
3	Klaten	356.750	36	356.786	100,00	100,00
4	Boyolali	257.057	141	257.198	91,72	91,77
5	Kudus	236.374	0	236.374	100,00	100,00
6	Jepara	264.075	2.351	266.426	83,53	84,27
7	Pati	358.032	87	358.119	98,72	98,75
8	Rembang	164.803	162	164.965	93,05	93,15
9	Blora	226.728	141	226.869	89,36	89,42
10	magelang	308.832	50	308.882	90,16	90,17
11	Kota Magelang	32.076	0	32.078	94,96	94,96
12	Purworejo	201.936	113	202.049	92,70	92,75
13	Temanggung	191.996	80	192.076	95,12	95,16
14	Kota Pekalongan	77.864	0	77.864	100,00	100,00
15	Pekalongan	185.234	289	185.523	87,34	87,47
16	Batang	186.256	295	186.551	97,45	97,60
17	Banyumas	431.356	1.001	432.357	96,85	97,07
18	Purbalingga	217.297	120	217.417	95,82	95,87
19	Banjarnegara	241.995	611	242.606	99,98	100,00
20	Wonosobo	211.814	300	212.114	98,05	98,19
21	Kota Salatiga	50.235	0	50.235	100,00	100,00
22	Semarang	273.414	0	273.414	100,00	100,00
23	Kota Semarang	463.659	0	463.659	99,78	99,78
24	Demak	292.244	0	292.244	97,18	97,18
25	Kendal	270.877	7	270.884	100,00	100,00
26	Grobogan	263.279	320	363.599	88,48	88,56
27	Surakarta	136.866	0	136.866	89,49	89,49
28	Karanganyar	240.200	20	240.220	100,00	100,00
29	Sukoharjo	258.367	0	258.367	100,00	100,00
30	Sragen	254.714	276	254.990	99,99	100,00
31	Wonogiri	241.870	1.001	242.871	88,92	89,29
32	Tegal	370.056	0	370.056	99,81	99,81
33	Kota Tegal	67.377	0	67.377	98,78	98,74
34	Brebes	426.829	0	426.829	90,53	90,53
35	Pemalang	321.294	0	321.294	100,00	100,00

Sumber: ESDM Prov Jateng, 2018

SIMPULAN

Hasil penilaian menunjukkan bahwa nilai Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Wonogiri pada pilar infrastruktur dibawah nilai rata-rata nilai indeks daya saing Kab/kota di Jawa Tengah. Pilar infrastruktur terbentuk dari dimensi infrastruktur transportasi dan dimensi infrastruktur air bersih dan kelistrikan. Penyebab rendahnya nilai daya saing daerah pada pilar infrastruktur, adalah: Dari dimensi transportasi, yakni Infrastruktur jalan dengan kondisi kurang baik/rusak masih ditemukan di beberapa daerah/kecamatan di Kab. Wonogiri. Selain itu sarana transportasi umum jumlahnya semakin menurun. Dari dimensi infrastruktur air bersih pada tahun 2016, Persentase rasio jumlah pelanggan air bersih dibanding jumlah penduduk yang memanfaatkan jaringan air bersih berbasis PDAM dan Pamsimas (Perpipaan) ataupun dari sumur gali dan sumber air bersih lainnya (non perpipaan) di Kabupaten Wonogiri yakni pada tahun 2016 yakni mencapai 80,31%. Sedangkan 19,69% masyarakat belum mendapatkan air bersih. Dari dimensi kelistrikan, persentase pelanggan

listrik di Kabupaten Wonogiri tahun 2018 adalah 89,29%, namun beberapa rumah yang tersebar di beberapa kecamatan masih belum tersambung dengan aliran listrik.

Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur harus menjadi prioritas dalam mendukung efisiensi dan efektivitas mobilitas ekonomi dan sosial di Kabupaten Wonogiri. Oleh karena itu perlu upaya dari pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan/perbaikan sektor infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Rencana aksi untuk mewujudkan kebijakan tersebut yakni dengan penambahan anggaran APBD guna mendorong pembangunan infrastruktur. Mendorong alokasi dana desa/kelurahan untuk pembangunan infrastruktur baik infrastruktur jalan, air bersih maupun sambungan listrik. Sehingga dari kolaborasi antara dana desa dan anggaran dari APBD tersebut harapannya dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan terkait infrastruktur di Kabupaten Wonogiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, A., Lee K.S. Murray M. 1996. *Infrastructure Bottleneck, private Provision, and Industrial Productivity : A Study of Indonesia and Thai Cities*. The World Bank, Policy Research Working Paper No. 1603.
- Bappeda dan Litbang Kabupaten Wonogiri. 2017. *Laporan akhir Studi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Wonogiri Tahun 2017*. Bappeda dan Litbang Kabupaten Wonogiri
- Bappeda Provinsi Jawa Tengah. 2018. *Pedoman Teknis Penilaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018*. Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

- Bappeda Banyuwangi. 2015. Peningkatan Daya Saing Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuwangi.
- BPS. 2017. *Kabupaten Wonogiri Dalam Angka 2017*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri.
- Dinas Perhubungan. 2017. *Sarana Angkutan Penumpang di Kabupaten Wonogiri Tahun 2017*. Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri.
- Kemenristekdikti. 2018. *Pedoman Teknis Penilaian Anugrah Iptek Budhipraja Tahun 2018*. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan. <https://anugerahiptek.ristekdikti.go.id>. Diakses pada 2 Juli 2018.
- Kristianto, S. I. 2015. *Analisis Konsumsi Listrik Rumah Tangga di Kecamatan Tembalang*. Skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Wasilan, A.Noor. 2015. *Peranan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasi Pada Kebijakan Pembangunan di Kota Samarinda*. Jurnal Mimbar Volume 31 Nomor 2 Hal. 359-366.